

ANALISIS TEORI EFEKTIVITAS REZIM INTERNASIONAL DAN KONSTRUKTIVIME TERHADAP PERAN UNHCR DALAM MENGATASI PENGUNGSI ROHINGYA DI BANGLADESH

Filemon Christian Waroy*, Try Danu Wijaya²

¹ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

² Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email Korespondensi: waroyfilemon@gmail.com

Abstract

The Rohingya refugee crisis in Bangladesh has become a global challenge that requires sustained intervention from the international community. This research analyzes the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in addressing the crisis through the perspective of International Regime Effectiveness theory and Constructivism. Using the literature study method, this research evaluates the effectiveness of UNHCR's policies and programs, including the provision of basic needs, legal protection, and education. The results show that although UNHCR has successfully met the urgent needs of refugees, constraints such as limited funding, local political resistance, and the lack of long-term solutions remain the main obstacles. From a constructivist perspective, UNHCR plays an important role in building norms of refugee protection and international solidarity, despite facing challenges in changing local norms in Bangladesh. This research emphasizes the need for strengthening international cooperation, donor commitment, and harmonization of global and local norms to ensure sustainable protection for Rohingya refugees.

Keywords: Rohingya, UNHCR, refugees, international regime effectiveness, constructivism, Bangladesh.

Abstrak

Krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh telah menjadi tantangan global yang memerlukan intervensi berkelanjutan dari komunitas internasional. Penelitian ini menganalisis peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani krisis tersebut melalui perspektif teori Efektivitas Rezim Internasional dan Konstruktivisme. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program UNHCR, termasuk penyediaan kebutuhan dasar, perlindungan hukum, dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNHCR telah berhasil memenuhi kebutuhan mendesak pengungsi, kendala seperti keterbatasan dana, resistensi politik lokal, dan minimnya solusi jangka panjang tetap menjadi hambatan utama. Dari perspektif konstruktivisme, UNHCR memainkan peran penting dalam membangun norma perlindungan pengungsi dan solidaritas internasional, meskipun menghadapi tantangan dalam mengubah norma lokal di Bangladesh. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan kerja sama internasional, komitmen donor, dan harmonisasi norma global dan lokal untuk memastikan perlindungan berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya.

Kata Kunci: Rohingya, UNHCR, pengungsi, efektivitas rezim internasional, konstruktivisme, Bangladesh.

Pendahuluan

Gambaran umum mengenai kemunculan pengungsi Rohingya di Bangladesh dimulai pada akhir abad ke-20. Meskipun pergerakan Rohingya ke dan dari Bangladesh telah berlangsung sejak abad ke-16 dan ke-17, mereka pertama kali secara resmi diakui sebagai pengungsi di Bangladesh pada tahun 1991-1992¹. Pada waktu itu, banyak Rohingya melarikan diri dari kekerasan dan penindasan yang terjadi di Myanmar. Sebagian besar dari kelompok ini berhasil dipulangkan pada tahun 1994, tetapi sekitar 20.000 orang tetap tinggal di Bangladesh. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi sekitar 36.000 orang, yang merupakan satu-satunya kelompok pengungsi terdaftar di Bangladesh pada saat itu. Namun, setelah tahun 1994, pemerintah Bangladesh mulai membatasi pendaftaran Rohingya sebagai pengungsi. Saat ini, sekitar 906.686 Rohingya yang berada di Bangladesh disebut sebagai Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) oleh UNHCR². Istilah ini tidak memberikan status pengungsi yang jelas, sehingga menciptakan ruang untuk berbagai interpretasi, termasuk kemungkinan mereka dianggap sebagai migran ilegal yang melanggar hukum imigrasi. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memainkan peran penting dalam menangani kebutuhan dan hak pengungsi secara global. Mandatnya meliputi penyediaan bantuan kemanusiaan, memastikan perlindungan hukum, dan memfasilitasi solusi yang tahan lama bagi para pengungsi. Pentingnya UNHCR digarisbawahi oleh pendekatan multifasetnya terhadap krisis pengungsi, yang mencakup bantuan langsung, advokasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan³

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani isu pengungsi Rohingya di Bangladesh melalui berbagai cara. Pertama, UNHCR bertanggung jawab untuk melindungi hak hak pengungsi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum internasional, serta memberikan dukungan hukum dan advokasi bagi Rohingya

¹ Haskindi, C. F. (2024). *Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi Rohingya di Bangladesh*. Universitas Katolik Parahyangan.

² Karim, M. U. (2023). Refugee Education in Bangladesh: A Nation-State Paradox. *Journal of Population and Social Studies (JPSS)*, 762–782.

³ Setiyono, J. (2017). Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No 3, 275 - 281.

yang mengalami penindasan di Myanmar⁴. Kedua, UNHCR menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan, dengan bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup pengungsi⁵. Ketiga, UNHCR memfasilitasi proses pemulangan yang aman dan sukarela bagi pengungsi ke Myanmar jika situasi di negara asal mereka membaik. Terakhir, UNHCR berperan sebagai penghubung antara komunitas internasional dan pemerintah Bangladesh, menggalang dukungan untuk mengatasi krisis ini. Dengan demikian, UNHCR sangat vital dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan advokasi bagi pengungsi Rohingya serta dalam upaya mencari solusi jangka panjang untuk masalah yang mereka hadapi⁶.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran UNCHR dalam pengelola krisis pengungsi di Bangladesh, khususnya terkait pengungsi Rohingya Fokus penelitian meliputi analisa terhadap upaya UNCHR dalam memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, dan membangun kerjasama internasional untuk menangani dampak krisis⁷. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang di hadapi UNCHR serta mengkaji efektivitas pendekatan yang digunakan dalam hukum dan norma internasional.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan laporan-laporan resmi yang diterbitkan oleh organisasi internasional, khususnya UNHCR. Penelitian ini juga mencakup analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen penting seperti laporan tahunan UNHCR yang memberikan informasi terkait kebijakan, program, dan hasil yang dicapai oleh UNHCR dalam menangani krisis pengungsi, termasuk di Bangladesh. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data sekunder yang valid dan terpercaya, serta untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan peran UNHCR dalam konteks internasional dan krisis pengungsi, yang

⁴ Venisa Yunita Sari, N. N. (2022). Implementasi Rexim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violanca di Tigray. *Intermestic : Journal of International tudies* , 154 – 18.

⁵ Rais, R. (2023). Peran UNHCR terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 101–118.

⁶ Rahman, M. M. (2021). The Rohingya refugee crisis and the role of UNHCR in Bangladesh. *Asian Journal of International Affairs*, 8(3), 233–250.

⁷ Zaman, T. (2022). International regime effectiveness and refugee protection: The case of Rohingya crisis. *Global Governance Review*, 14(2), 87–104.

kemudian dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan UNHCR dalam menangani masalah pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Hasil dan Pembahasan

Peran UNHCR Di Bangladesh

Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) di Bangladesh dalam menangani pengungsi Rohingya sangat krusial sejak gelombang eksodus besar tahun 2017 yang menyebabkan lebih dari 900.000 orang Rohingya bermukim di wilayah Cox's Bazar dan sekitarnya⁸. Sebagai badan PBB yang memiliki mandat perlindungan pengungsi, UNHCR menjalankan fungsi registrasi dan dokumentasi biometrik untuk memastikan identitas serta akses bantuan bagi para pengungsi. Selain itu, UNHCR mengadvokasi prinsip *non-refoulement* atau larangan pemulangan paksa, mengingat Bangladesh bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951⁹. Dalam konteks ini, UNHCR berperan sebagai penjaga norma internasional perlindungan pengungsi agar tetap dihormati, meskipun tidak ada kewajiban hukum formal yang mengikat pemerintah Bangladesh. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan

1. Penyediaan kebutuhan dasar (pangan, air, kesehatan)

UNHCR berperan penting dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh. Dalam penyediaan pangan, UNHCR bekerja sama dengan WFP meskipun mengalami pemotongan anggaran pada tahun 2023, yang menurunkan alokasi dari \$12 menjadi \$8 per orang per bulan. Organisasi ini juga memberikan bantuan seperti kit kebersihan, selimut, dan bahan bakar masak, dengan distribusi mencapai 90% rumah tangga di kamp-kamp¹⁰. Untuk kesehatan, UNHCR mendukung layanan primer melalui 32 pusat kesehatan, memastikan layanan meliputi vaksinasi, perawatan kesehatan ibu dan anak, serta program gizi. Pada tahun 2023, 97% anak-anak mendapatkan vaksin campak, sementara layanan kesehatan ibu mencatat 83% kelahiran ditangani tenaga medis terlatih. Selain itu, dua fasilitas kesehatan besar, termasuk rumah sakit di Ukhiya, diperbarui untuk

⁸ Zaman, T. (2022). International regime effectiveness and refugee protection: The case of Rohingya crisis. *Global Governance Review*, 14(2), 87–104.

⁹ Moinuddin, M. Z., Rahman, M. M., & Karim, A. (2026). Global and regional migration frameworks: A case study on the Rohingya displacement. *Refugee Policy Journal*, 5(1), 45–62.

¹⁰ Faruque, T. E. (2020). Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: The Case of UNHCR's Response. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL* VOL. 9.

meningkatkan akses layanan medis. Di bidang sanitasi, UNHCR memelihara lebih dari 6.000 sumur bor, menyediakan 31 liter air bersih per hari per orang di Cox's Bazar, serta membangun lebih dari 22.000 jamban. Program ini juga melibatkan pelatihan dan distribusi perlengkapan kebersihan untuk mencegah penyakit berbasis air¹¹.

2. Dukungan pendidikan dan perlindungan hukum bagi pengungsi UNHCR memfasilitasi akses pendidikan dengan mendirikan 792 pusat pembelajaran di Cox's Bazar dan Bhasan Char, memungkinkan lebih dari 77.000 pengungsi, termasuk 37.826 anak perempuan, mengikuti pendidikan formal dan informal. Selain itu, kurikulum Myanmar diluncurkan sepenuhnya, memungkinkan 24.565 siswa bertransisi dari pembelajaran informal ke pendidikan formal. UNHCR juga memberikan pelatihan keterampilan pra-vokasional kepada lebih dari 14.000 remaja, membuka jalan bagi pelatihan vokasional lanjutan¹². Dalam hal perlindungan hukum, UNHCR membantu pengungsi mendapatkan dokumentasi resmi seperti kartu identitas dan registrasi kelahiran. Pada tahun 2023, lebih dari 25.000 kelahiran baru dicatat. Organisasi ini juga menyediakan bantuan hukum kepada korban kekerasan, perdagangan manusia, dan pengungsi yang ditahan karena pelanggaran imigrasi. Sebanyak 6.079 pengungsi menerima layanan hukum berupa konseling dan rujukan ke layanan khusus¹³.
3. Kerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan aktor internasional lainnya UNHCR bekerja erat dengan pemerintah Bangladesh, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kantor Komisioner Pengungsi dan Pemulangan (RRRC), untuk memastikan pengelolaan kamp dan distribusi bantuan berjalan lancar. Bersama RRRC, UNHCR memimpin koordinasi di 33 kamp di Cox's Bazar dan pulau Bhasan Char. Kolaborasi ini mencakup registrasi biometrik lebih dari 58.800 pengungsi baru pada tahun 2023¹⁴. Di tingkat internasional, UNHCR memobilisasi dukungan dari berbagai mitra seperti IOM, UNICEF,

¹¹ Reuters. (2025, March 24). Rohingya in Bangladesh face dire consequences if aid drops, say UN agencies. *Reuters*.

¹² Rahman, M. M. (2021). The Rohingya refugee crisis and the role of UNHCR in Bangladesh. *Asian Journal of International Affairs*, 8(3), 233–250.

¹³ Hart, J. (2020). Humanitarian Solutions to Improve dignity and well-being for rohingnya refugees in Bangladesh. Melbourne: Centre for Humanitarian Leadership.

¹⁴ Agency, U. f. (2024, August 22). Rohingya Refugee Crisis Explained . Retrieved from [www.unrefugee.org: http://www.unrefugee.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/](http://www.unrefugee.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/).

dan lembaga keuangan seperti World Bank. Selain itu, UNHCR memimpin forum multilateral seperti Global Refugee Forum 2023, menghasilkan komitmen internasional untuk mendukung pengungsi Rohingya. Kolaborasi ini menghasilkan inisiatif pengembangan kapasitas seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, meskipun terbatas oleh kebijakan nasional yang melarang pengungsi bekerja secara formal. Tantangan Bagi Pengungsi Rohingya Di Bangladesh UNHCR menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menangani pengungsi Rohingya di Bangladesh, terutama di kamp pengungsi Cox's Bazar yang sangat padat. Salah satu tantangan utama adalah masalah overcrowding. Kamp-kamp ini menampung pengungsi dalam jumlah besar, menyebabkan kepadatan luar biasa yang berdampak buruk pada kualitas hidup. Banyak keluarga tinggal dalam kondisi tidak layak, dengan tempat tinggal yang rapuh dan sering mengalami kerusakan akibat hujan deras. Masalah sanitasi juga memburuk akibat keterbatasan fasilitas dasar, seperti kurangnya jumlah toilet dan fasilitas mandi yang memadai, serta pencahayaan yang buruk. Situasi ini diperburuk oleh bencana tahunan seperti banjir dan kebakaran yang mengancam keselamatan penghuni kamp¹⁵.

Selain itu, UNHCR menghadapi kekurangan pendanaan internasional yang semakin membatasi kemampuannya untuk memberikan layanan yang memadai kepada para pengungsi. Fokus global terhadap krisis lain, seperti konflik di Ukraina dan Afghanistan, telah mengurangi alokasi dana untuk krisis Rohingya. Akibatnya, beberapa kebutuhan penting, seperti perbaikan tempat tinggal, pasokan makanan, dan layanan kesehatan, menjadi tidak terpenuhi. Banyak pengungsi melaporkan bahwa bantuan yang diterima tidak mencukupi, seperti suplai LPG yang sering habis sebelum siklus distribusi berikutnya. Selain itu, pengungsi sering menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan karena obat-obatan yang tidak tersedia dan waktu tunggu yang lama di fasilitas medis. Tantangan lainnya adalah ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kamp. Kehadiran pengungsi dalam jumlah besar menciptakan tekanan terhadap sumber daya lokal yang terbatas, seperti tanah, air,

¹⁵ Reza, S. M. (2024, Juni 26). Six Years of Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: From Here to Where? Retrieved from ASIA PEACEBUILDING INITIATIVE : https://www.spf.org/apbi/news_en/b_240627.

dan fasilitas publik. Sebagian besar pengungsi harus membayar kepada komunitas lokal untuk menyewa lahan tempat mereka tinggal, yang menciptakan hubungan ekonomi yang kompleks. Ketegangan ini seringkali memicu konflik sosial antara kedua kelompok¹⁶.

Oleh karena itu, UNHCR harus menghadapi dilema tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, tetapi juga mengelola hubungan antara pengungsi dan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, tantangan ini membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis kebutuhan. Hal ini meliputi penggalangan dana yang lebih efektif, peningkatan infrastruktur kamp untuk mengurangi dampak overcrowding, dan kerja sama dengan masyarakat lokal untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Analisis Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Bangladesh Berdasarkan Teori Efektivitas Rezim Internasional

Teori efektivitas rezim internasional oleh Arild Underdal menekankan bahwa efektivitas suatu rezim internasional dapat dinilai berdasarkan tiga aspek utama: output (hasil kebijakan yang diadopsi), outcome (perubahan perilaku yang dihasilkan), dan impact (dampak yang tercapai terhadap permasalahan yang dihadapi)¹⁷. Berdasarkan teori ini, analisis peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Bangladesh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Output:** Kebijakan dan Program yang Diadopsi UNHCR telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menangani kebutuhan dasar pengungsi. Program seperti distribusi pangan, pembangunan infrastruktur kesehatan, serta peluncuran kurikulum Myanmar merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan mendesak pengungsi Rohingya¹⁸. Selain itu, kebijakan registrasi biometrik dan pemberian dokumen identitas memperlihatkan upaya UNHCR dalam melindungi hak-hak hukum pengungsi. Namun, keterbatasan sumber daya, seperti pemotongan anggaran pangan, menunjukkan adanya tantangan struktural dalam

¹⁶ Hossain, S. (2023, September 25). The Rohingya Crisis: Challenges to Achieving a Sustainable Solution. Retrieved from THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE: <https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2023/09/25/the-rohingya-crisis-challenges-to-achieving-a-sustainable-solution/>.

¹⁷ DUGI, V. (2018). TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL (PRESPEKTIF - PRESPEKTIF KLASIK) Edisi Revii. Surabaya : Airlangga University .

¹⁸ UNHCR. (2023). Annual Results Report 2023 Bangladesh. UNHCR The UN Refugee Agency.

kapasitas output UNHCR. Meskipun kebijakan telah diadopsi, pelaksanaannya belum optimal karena ketergantungan pada dukungan donor internasional dan koordinasi yang kompleks di lapangan.

2. **Outcome:** Perubahan Perilaku Pengungsi dan Pemerintah Dalam konteks outcome, UNHCR telah berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik di kalangan pengungsi maupun pemerintah Bangladesh. Di sisi pengungsi, program pendidikan dan pelatihan keterampilan telah meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan produktif, meskipun terbatas pada tingkat informal¹⁹. Di sisi pemerintah, kolaborasi dengan RRRC dan kementerian terkait menunjukkan peningkatan koordinasi untuk pengelolaan kamp dan perlindungan hukum pengungsi. Namun, outcome ini masih menghadapi kendala seperti pembatasan akses terhadap pekerjaan formal bagi pengungsi dan tekanan keamanan yang meningkat di kamp. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku belum sepenuhnya mengarah pada kemandirian dan keberlanjutan jangka panjang.
3. **Impact:** Dampak pada Permasalahan Pengungsi Rohingya Dampak dari upaya UNHCR terlihat dalam peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Dengan cakupan vaksinasi anak mencapai 97% dan akses air bersih mencapai 31 liter per hari per orang, UNHCR telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pengungsi²⁰. Namun, secara keseluruhan, dampaknya masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan mendesak, tanpa solusi jangka panjang seperti repatriasi yang aman dan bermartabat atau integrasi lokal.

Hambatan politik antara Bangladesh dan Myanmar, serta kurangnya dukungan internasional yang memadai, membatasi efektivitas rezim dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis ini, efektivitas UNHCR sebagai bagian dari rezim internasional dalam menangani pengungsi Rohingya dapat dianggap signifikan pada level output dan outcome, tetapi masih memiliki keterbatasan pada level

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Faruque, T. E. (2020). Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: The Case of UNHCR's Response. JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 9.

impact²¹. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas rezim internasional, seperti yang diuraikan oleh Underdal, sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor internasional seperti UNHCR untuk mengatasi kendala sumber daya, tantangan politik, dan resistensi dari aktor lokal. Meningkatkan efektivitas rezim membutuhkan penguatan dukungan internasional dan komitmen negara-negara terkait untuk mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya.

Analisis Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Bangladesh Berdasarkan Teori Konstruktivisme

Alexander Wendt Konstruktivisme Alexander Wendt berfokus pada peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk interaksi dan perilaku aktor internasional. Dalam konteks ini, peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Bangladesh dapat dianalisis melalui lensa konstruktivisme dengan menekankan bagaimana norma internasional tentang perlindungan pengungsi, identitas kolektif komunitas internasional, dan konstruksi sosial dari konsep “pengungsi” memengaruhi tindakan UNHCR dan respons terhadap krisis ini.

1. Norma Perlindungan Pengungsi sebagai Landasan Tindakan UNHCR beroperasi berdasarkan norma global tentang perlindungan pengungsi, yang diabadikan dalam prinsip *non-refoulement* dan hak asasi manusia. Sebagai badan yang bertugas memastikan perlindungan pengungsi, UNHCR telah menciptakan dan mempromosikan norma ini melalui program yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses pangan, kesehatan, dan sanitasi²². Namun, norma ini menghadapi tantangan di Bangladesh karena pemerintah tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan kurangnya kerangka hukum nasional untuk pengungsi. Meskipun demikian, UNHCR berhasil menciptakan pengakuan *de facto* atas perlindungan pengungsi melalui registrasi biometrik dan kolaborasi dengan otoritas lokal untuk memberikan dokumentasi seperti kartu identitas. Norma-norma internasional ini menjadi pedoman tindakan UNHCR dan secara bertahap memengaruhi kebijakan lokal di Bangladesh meskipun ada resistensi struktural.

²¹ Reuters. (2025, July 11). Support for Rohingya refugees in Bangladesh risks collapse, UN refugee agency says. *Reuters*.

²² *ibid*

2. Identitas Kolektif Komunitas Internasional Konstruktivisme melihat identitas sebagai sesuatu yang dibentuk oleh interaksi sosial. UNHCR berperan membentuk identitas komunitas internasional sebagai "pelindung" pengungsi dengan melibatkan aktor global seperti WFP, UNICEF, dan Bank Dunia dalam upaya kolektif menangani krisis Rohingya. Forum seperti Global Refugee Forum 2023 menunjukkan bagaimana UNHCR mengkonstruksi identitas bersama, yaitu tanggung jawab kolektif untuk mendukung pengungsi Rohingya. Komitmen dari negara-negara donor dan organisasi internasional untuk mendukung pengungsi, meskipun tidak selalu optimal, mencerminkan keberhasilan UNHCR dalam mendorong solidaritas global. Namun, identitas kolektif ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi solusi jangka panjang, seperti repatriasi yang aman atau integrasi lokal²³. Tantangan seperti minimnya dukungan keuangan dan politik dari beberapa negara menunjukkan bahwa konstruksi identitas ini masih lemah di tingkat implementasi.
3. Konsep "Pengungsi" dan Reproduksi Sosial Krisis Rohingya Konstruktivisme menganggap bahwa konsep seperti "pengungsi" bukanlah sesuatu yang alami, tetapi dibentuk oleh interaksi sosial dan norma internasional. UNHCR memainkan peran penting dalam mendefinisikan pengungsi Rohingya sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan internasional (UNHCR, 2023). Melalui program pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum, UNHCR mengadvokasi perlakuan terhadap pengungsi Rohingya sebagai subjek yang memiliki hak asasi manusia yang sama dengan warga negara lainnya. Namun, status pengungsi yang terpinggirkan sering kali direproduksi oleh norma-norma lokal di Bangladesh, seperti pelarangan bekerja secara formal dan akses terbatas terhadap pendidikan formal. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma internasional yang dipromosikan UNHCR dan norma lokal yang membatasi otonomi pengungsi. UNHCR harus terus mengadvokasi perubahan norma ini untuk meningkatkan kesejahteraan pengungsi.

Melalui lensa konstruktivisme Alexander Wendt, peran UNHCR dalam menangani

²³ Islam, M. M., & Nuzhath, T. (2020). Health risks of Rohingya refugee population in Bangladesh: A call for global attention. *Journal of Global Health*, 10(2), 020309.

pengungsi Rohingya dapat dilihat sebagai upaya untuk membentuk norma perlindungan pengungsi, membangun identitas kolektif komunitas internasional, dan merekonstruksi konsep pengungsi sebagai entitas yang memiliki hak. Meskipun berhasil dalam beberapa aspek, seperti menciptakan kerangka kerja perlindungan dan memperkuat solidaritas internasional, UNHCR menghadapi tantangan dalam mengubah norma lokal dan mencapai solusi jangka panjang. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk menyelaraskan norma internasional dan lokal guna meningkatkan efektivitas perlindungan pengungsi Rohingya.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh memiliki dampak signifikan, terutama dalam aspek penyediaan kebutuhan dasar, perlindungan hukum, dan peningkatan akses pendidikan. Melalui teori Efektivitas Rezim Internasional, terlihat bahwa keberhasilan UNHCR terletak pada implementasi kebijakan yang responsif meskipun terbatas oleh keterbatasan sumber daya. Dari perspektif konstruktivisme, UNHCR telah berhasil membentuk norma perlindungan pengungsi di tingkat internasional dan lokal, meskipun tantangan berupa resistensi politik dan norma lokal masih menghambat pencapaian solusi jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan internasional dan peningkatan sinergi antara norma global dan lokal untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas perlindungan pengungsi Rohingya..

Referensi

- Agency, U. F. (2024, August 22). *Rohingya refugee crisis explained*. UN Refugee Agency. <http://www.unrefugee.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>
- Dugi, V. (2018). *Teori hubungan internasional (Perspektif-perspektif klasik) edisi revisi*. Airlangga University Press.
- Faruque, T. E. (2020). Rohingya refugee crisis in Bangladesh: The case of UNHCR's response. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9, 1–15.
- Hart, J. (2020). *Humanitarian solutions to improve dignity and well-being for Rohingya refugees in Bangladesh*. Centre for Humanitarian Leadership.
- Haskindi, C. F. (2024). *Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi Rohingya di Bangladesh*. Universitas Katolik Parahyangan.

Hossain, S. (2023, September 25). The Rohingya crisis: Challenges to achieving a sustainable solution. *London School of Economics and Political Science*.
<https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2023/09/25/the-rohingya-crisis-challenges-to-achieving-a-sustainable-solution/>

Islam, M. M., & Nuzhath, T. (2020). Health risks of Rohingya refugee population in Bangladesh: A call for global attention. *Journal of Global Health*, 10(2), 020309.

Karim, M. U. (2023). Refugee education in Bangladesh: A nation-state paradox. *Journal of Population and Social Studies*, 762–782.

Moinuddin, M. Z., Rahman, M. M., & Karim, A. (2026). Global and regional migration frameworks: A case study on the Rohingya displacement. *Refugee Policy Journal*, 5(1), 45–62.

Rahman, M. M. (2021). The Rohingya refugee crisis and the role of UNHCR in Bangladesh. *Asian Journal of International Affairs*, 8(3), 233–250.

Rais, R. (2023). Peran UNHCR terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 101–118.

Reuters. (2025, March 24). Rohingya in Bangladesh face dire consequences if aid drops, say UN agencies. *Reuters*.

Reuters. (2025, July 11). Support for Rohingya refugees in Bangladesh risks collapse, UN refugee agency says. *Reuters*.

Reza, S. M. (2024, June 26). Six years of Rohingya refugee crisis in Bangladesh: From here to where? *Asia Peacebuilding Initiative*.
https://www.spf.org/apbi/news_en/b_240627

Setiyono, J. (2017). Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi internasional di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 275–281.

UNHCR. (2023). *Annual results report 2023 Bangladesh*. UNHCR The UN Refugee Agency.

Venisa Yunita Sari, N. N. (2022). Implementasi rezim internasional dalam menangani conflict-related sexual violence di Tigray. *Intermestic: Journal of International Studies*, 154–168.

Zaman, T. (2022). International regime effectiveness and refugee protection: The case of Rohingya crisis. *Global Governance Review*, 14(2), 87–104.